

Analisis Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Kuri Wamesa

Arkam^{1*}

¹*Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota, Fakultas Teknik dan Konservasi,
Universitas Muhammadiyah Berau, Kalimantan Timur*

**Email: arkampl95@gmail.com; arkam@umberau.ac.id*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang berpengaruh serta menilai kelayakan Distrik Nikiwar sebagai calon ibu kota kabupaten pada rencana Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kuri Wamesa. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini mencakup pendekatan teoritis, kebijakan, dan peraturan perundang-undangan. Dalam proses pengumpulan data, digunakan pendekatan eksploratif, studi dokumenter, serta pendekatan preskriptif. Analisis dilakukan terhadap data sekunder dan data primer untuk memperoleh gambaran menyeluruh dan menjawab permasalahan yang menjadi fokus kajian. Teknik analisis yang digunakan meliputi analisis kesesuaian lahan dan metode Analytical Hierarchy Process (AHP). Hasil kajian menunjukkan bahwa lokasi studi memiliki kemampuan lahan yang tinggi. Berdasarkan klasifikasi kemampuan pembangunan lahan, Distrik Nikiwar berada pada kategori tinggi dan memiliki potensi untuk dikembangkan secara maksimal. Selain itu, Distrik Nikiwar dinilai layak sebagai ibu kota kabupaten berdasarkan penilaian terhadap parameter perencanaan wilayah, kondisi fisik lingkungan, potensi kebencanaan, kebijakan, pembangunan ekonomi, serta aspek sosial budaya.

Kata kunci: *Evaluasi kelayakan wilayah; kesesuaian lahan; metode AHP; pemekaran wilayah*

PENDAHULUAN

Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pemecahan wilayah, dari sebuah wilayah provinsi, kabupaten atau kota menjadi lebih dari satu wilayah (Wahyuningsih, dkk., 2020). Pemekaran daerah merupakan suatu proses pembentukan daerah otonomi baru dari suatu daerah yang sudah ada. Pembentukan pemekaran daerah baru atas dasar asas desentralisasi yang mengaplikasikan pembagian kewenangan untuk mengatur rumah tangga daerah itu sendiri (Ama, 2025). Dalam Undang-Undang dijelaskan bahwa pemekaran wilayah tidak hanya diartikan sebagai pembentukan daerah baru tetapi dapat berupa penggabungan beberapa kabupaten/ kota yang bersandingan pada wilayah kabupaten/kota yang berbeda (Tangke, dkk., 2021). Ibukota merupakan pusat pemerintahan yang memiliki status utama dalam suatu roda pemerintahan yang diatur oleh peraturan perundangan yang berlaku (Pratama, dkk., 2018). Ibukota kabupaten memiliki fungsi utama penyelenggaraan pemerintahan, politik, ekonomi dan sosial, serta berperan dalam mendorong terlaksananya

penyelenggaraan pelayanan publik yang optimal dan merata. Permasalahan yang muncul dalam proses pemekaran wilayah adalah penentuan letak ibukota, yang merupakan pusat pemerintahan daerah tersebut berkedudukan (Fachrurrizal & Hayati, 2014). Penempatan ibukota dipilih berdasarkan kajian terhadap bagian dari wilayah yang berpotensi menjadi ibukota. Dalam rangka mempersiapkan pemekaran wilayah calon daerah otonom baru Kabupaten Kuri Wamesa, maka perlu juga menyediakan kawasan yang layak memiliki daya dukung lahan yang memadai dalam pelaksanaan aktivitas pemerintah, ekonomi dan sosial. Kelayakan lokasi calon ibukota Kabupaten Kuri Wamesa sebagai pusat pemerintahan juga harus mempertimbangkan faktor-faktor yang memungkinkan terjadinya hubungan yang efektif antara pusat pemerintahan kabupaten dengan masyarakat diwilayahnya, sehingga pertimbangan kebutuhan akan ruang spasial untuk memaksimalkan pelayanan dan aksesibilitas yang baik untuk masyarakat sangat diperlukan guna memaksimalkan terciptanya pembangunan ekonomi masyarakat yang kondusif serta roda pemerintahan berjalan lancar, aman dan efektif. Penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang objektif dan akuntabel, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan mengenai rencana pembentukan ibukota calon Kabupaten Kuri Wamesa dimasa mendatang.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Distrik Nikiwar, Kabupaten Teluk Wondama. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Sumber data pada penelitian ini berasal dari telaah pustaka yang bersumber dari buku, hasil penelitian, dokumen kebijakan daerah, dan peraturan perundang-undangan, serta survei lapangan pada lokasi penelitian dengan mengamati secara langsung serta wawancara dengan masyarakat (tokoh adat, tokoh masyarakat, dan pemerintah setempat). Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan spasial untuk kebutuhan analisis satuan kemampuan lahan, serta *Analitycal Hierarchy Process (AHP)* untuk mengkaji kelayakan aspek perencanaan wilayah, fisik lingkungan, kebencanaan, kebijakan, ekonomi pembangunan, dan sosial budaya (Kurniawati & Munir, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ibukota dari konteks konseptual memiliki arti sebagai wilayah pusat diselenggarakannya pemerintahan (Rantini, 2023). Berdasarkan pemahaman tersebut, maka fungsi utama dari ibukota adalah penyelenggaraan pemerintahan dimana berbagai badan atau lembaga negara menjalankan fungsi masing-masing. Calon daerah otonom baru Kabupaten Kuri Wamesa Provinsi Papua Barat merupakan wilayah Kabupaten Teluk Wondama yang meliputi 6 (enam) distrik, yaitu Distrik Windesi (565.13 ha), Distrik Nikiwar (241.34 ha), Distrik Wamesa (590.32 ha), Distrik Sougwepu (496.07 ha), Distrik Rumberpon (105.38 ha), dan Distrik Roswar (110.86 ha), sehingga total luas mencapai 2,109.10 ha.



Gambar 1. Peta Administrasi Wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Kuri Wamesa dan Lokasi Ibukota Kabupaten.

Faktor yang Memengaruhi Penentuan Lokasi Ibukota Kabupaten Rencana Daerah Otonom Baru Kabupaten Kuri Wamesa

Wilayah yang menjadi calon ibukota, memiliki kriteria-kriteria tertentu seperti jarak fisik yang idealnya dekat dengan wilayah sekitarnya agar mudah dijangkau oleh wilayah lain (Dianutami, dkk., 2023). Analisis daya dukung fisik wilayah dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memahami kemampuan sebuah wilayah untuk menampung penggunaan lahan dan aktivitas manusia. Secara garis besar analisis daya dukung fisik wilayah akan dilakukan dua analisis besar, yaitu analisis kemampuan lahan dan analisis kesesuaian lahan (Milasari, dkk., 2023). Hasil analisis aspek fisik satuan kemampuan lahan kestabilan lereng di lokasi studi, memiliki kemampuan lahan bervariasi dari klasifikasi kurang-tinggi.

Tabel 1. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Lereng

No.	Distrik	Klasifikasi SKL Kestabilan Lereng			
		Kurang	Cukup	Sedang	Tinggi
1.	Windesi	399.82	10.875.39	39.660.30	7.888.41
2.	Nikiwar	1.683.41	2.889.20	15.222.98	3.940.10
3.	Wamesa	4791.59	8.244.08	38.930.67	5.805.29
4.	Rumberpon	0.69	2.971.81	2.173.61	5.018.42
5.	Soug Wepu	3.198.24	8.310.99	32.293.87	5.659.64
6.	Roswar	46.96	1.861.31	8.554.80	490.84
Luas (Ha)		10,120.71	35,152.78	136,836.23	28,802.70

Analisis dan perhitungan skoring, seluas 11,002.97 ha merupakan daerah dengan daya dukung dan kestabilan pondasi cukup, serta seluas 16.65 ha di studi merupakan daerah dengan kestabilan pondasi kurang.

Tabel 2. Satuan Kemampuan Lahan Kestabilan Pondasi

No.	Distrik	Klasifikasi SKL Kestabilan Pondasi			
		Kurang	Cukup	Sedang	Tinggi
1.	Windesi	88.49	24,117.07	28,609.53	5,608.84
2.	Nikiwar	16.65	11,002.97	9,048.89	3,667.18
3.	Wamesa	897.24	24,555.28	26,560.71	6,158.40
4.	Rumberpon	0.69	5,118.03	2,629.47	2,416.33
5.	Soug Wepu	124.91	23,539.48	19,524.00	6,274.35
6.	Roswar	46.96	1,757.48	8,837.72	311.74
Luas (Ha)		1,174.94	90,090.31	95,210.32	24,436.84

Analisis dan perhitungan skoring satuan kemampuan lahan drainase dapat diketahui bahwa lokasi studi memiliki tingkat kestabilan drainase cukup dan tinggi. Terdapat kondisi drainase yang airnya mudah mengalir dan tidak menyebabkan kawasan perkotaan tergenang.

Tabel 3. Satuan Kemampuan Lahan Drainase

No.	Distrik	Klasifikasi SKL Drainase			
		Kurang	Cukup	Sedang	Tinggi
1.	Windesi	-	45,520.43	-	13,103.15
2.	Nikiwar	-	16,956.95	-	6,778.75
3.	Wamesa	-	50,919.20	-	6,916.48
4.	Rumberpon	-	5,159.77	-	5,078.00
5.	Soug Wepu	-	43,604.07	-	5,889.09
6.	Roswar	-	10,397.43	-	589.09
Luas (Ha)		-	172,557.90	-	38,354.56

Analisis dan perhitungan skoring, di lokasi studi seluas 18.392,00 ha memiliki tingkat kemampuan lahan erosi yang cukup yang artinya pengikisan tanah pada lokasi studi berpotensi sedang, karena mempunyai kondisi morfologi datar dan kelerengan 0-8%. Sehingga lokasi studi sudah sesuai jika diperuntukkan sebagai kawasan perkotaan.

Tabel 4. Satuan Kemampuan Lahan Terhadap Erosi

No.	Distrik	Klasifikasi SKL Terhadap Erosi			
		Kurang	Cukup	Sedang	Tinggi
1.	Windesi	3,921.90	35,118.86	-	19,783.18
2.	Nikiwar	3,694.27	18,392.00	-	1,649.43
3.	Wamesa	3,540.73	43,303.51	-	10,927.37
4.	Rumberpon	1,234.31	7,275.81	-	1,654.42
5.	Soug Wepu	4,383.53	38,648.31	-	6,430.89
6.	Roswar	101.50	3,219.01	-	7,633.38
Luas (Ha)		16,876.24	145,957.50	-	48,078.67

Kemampuan lahan yang ada di lokasi studi memiliki kemampuan lahan bervariasi dari klasifikasi kurang-tinggi.

Tabel 5. Satuan Kemampuan Lahan Morfologi

No.	Distrik	Klasifikasi SKL Morfologi Kawasan				
		Rendah	Kurang	Cukup	Sedang	Tinggi
1.	Windesi	1.15	6,665.91	10,920.83	32,935.81	7,900.25
2.	Nikiwar	32.06	6,241.52	2,955.54	10,558.36	3,948.21
3.	Wamesa	191.36	18,049.50	8,366.35	25,339.42	5,824.97
4.	Rumberpon	-	70.70	2,971.81	2,503.61	5,018.42
5.	Soug Wepu	75.47	10,079.85	8,475.42	25,146.98	5,685.00
6.	Roswar	-	2,623.13	1,861.31	5,978.62	490.84
Luas (Ha)		300.04	43,730.61	35,551.26	102,462.80	28,867.69

Berdasarkan morfologi kawasan dihubungkan dengan kemudahan mengerjakan pada lahan di lokasi studi, hasilnya menunjukkan bahwa kawasan ini memiliki kemampuan lahan dengan klasifikasi sedang dan tinggi.

Tabel 6. Satuan Kemampuan Lahan Kemudahan Dikerjakan

No.	Distrik	Klasifikasi SKL Kemudahan Dikerjakan			
		Kurang	Cukup	Sedang	Tinggi
1.	Windesi	-	-	19,712.54	38,911.06
2.	Nikiwar	-	-	2,025.81	21,709.88
3.	Wamesa	-	-	8,528.92	49,306.75
4.	Rumberpon	-	-	1,680.76	8,557.02
5.	Soug Wepu	-	-	1,794.27	47,698.88
6.	Roswar	-	-	7,589.70	3,396.82
Luas (Ha)		-	-	41,332.00	169,580.40

Analisis dan perhitungan skoring dapat diketahui bahwa lokasi studi memiliki kemampuan lahan untuk pembuangan limbah kurang, berarti kondisi pada kawasan tersebut kurang mendukung sebagai tempat pembuangan limbah dan kurang mampu menjadi tempat penampungan dan pengelolaan limbah.

Tabel 7. Satuan Kemampuan Lahan Pembuangan Limbah

No.	Distrik	Klasifikasi SKL Pembuangan Limbah			
		Kurang	Rendah	Sedang	Cukup
1.	Windesi	46,610.49	10,621.50	2,004.32	-
2.	Nikiwar	15,729.00	6,778.74	1,227.95	-
3.	Wamesa	33,996.02	6,907.83	16,892.27	12.25
4.	Rumberpon	5,029.52	5,023.66	70.45	-
5.	Soug Wepu	30,430.26	5,918.52	13,126.96	17.40
6.	Roswar	7,319.61	575.36	2,620.29	-
Luas (Ha)		139,114.90	35,825.61	35,942.24	29.65

Berdasarkan Uji Laboratorium yang dilakukan di Balai Besar Laboratorium Kesehatan Makassar, air Sungai DAS Werabur, Kampung Werabur, Distrik Nikiwar menunjukkan hasil pemeriksaan parameter suhu air ($^{\circ}\text{C}$) dan derajat keasaman (pH) air.

Tabel 8. Hasil Uji Laboratorium Terhadap Kualitas Air Permukaan Sungai Werabur

No.	Parameter Uji	Satuan	Baku Mutu	Hasil Pemeriksaan
1.	Suhu/Temperature	$^{\circ}\text{C}$	Dev. 3	27.8
2.	Zat Padat Terlarut/Total Dissolved Solid	mg/l	1.000	26.83
3.	Warna/Color	Pt-Co Unit	40	50
4.	pH	-	6 - 9	7.79
5.	Raksa/Mercury (Hg) terlarut	mg/l	0.002	<0.0005
6.	Selenium (Se) terlarut	mg/l	0.01	<0.0003
7.	Arsen/Arsenic (As) terlarut	mg/l	0.05	<0.0001
8.	Besi/Iron (Fe) terlarut	mg/l	-	<0.01
9.	Seng/Zinc (Zn) terlarut	mg/l	0.05	0.16
10.	Tembaga/Copper (Cu) terlarut	mg/l	0.02	<0.001
11.	Timbal/Lead (Pb) terlarut	mg/l	0.03	<0.0001
12.	Deterjen Total/Detergent (LAS)	mg/l	0.2	<0.05

Ada dua parameter yang tidak memenuhi syarat yakni parameter uji warna mencapai 50 yang lebih besar dari standar baku mutu air sebesar 40 dan parameter uji Seng (Zn) yang mencapai 0.16 dengan standar baku mutu air sebesar 0.05. Secara umum rata-rata memenuhi syarat dalam ketentuan penggunaan air dengan klasifikasi baku mutu air kelas II. Berdasarkan Uji Laboratorium air tanah (sumur), Kampung Werianggi, Distrik Nikiwar menunjukkan hasil pemeriksaan parameter suhu air ($^{\circ}\text{C}$) dan derajat keasaman (pH) air untuk keperluan higiene dan sanitasi.

Tabel 9. Hasil Uji Laboratorium Terhadap Kualitas Air Tanah Kampung Werianggi

No.	Parameter Uji	Satuan	Batas Maksimum	Hasil Pemeriksaan
A. Fisikal				
1.	Suhu	$^{\circ}\text{C}$	Suhu udara ± 3	U/A 30/28.0
2.	Zat Padat Terlarut	mg/l	<300	13.57
3.	Kekeruhan		<3	0.661
4.	Warna	Pt-Co Unit	10	5
5.	Bau	-	Tidak berbau	Tidak berbau
B. Kimia				
1.	pH	-	6.5 – 8.5	6.79
2.	Nitrat (Sebagai NO_3 terlarut)	mg/l	20	0.234
3.	Nitrit (Sebagai NO_2 terlarut)	mg/l	3	<0.002
4.	Chorium Valensi 6 (Cr^{+6}) terlarut	mg/l	0.01	<0.01

No.	Parameter Uji	Satuan	Batas Maksimum	Hasil Pemeriksaan
5.	Besi (Fe) terlarut	mg/l	0.2	<0.01
6.	Mangan (Mn) terlarut	mg/l	0.1	0.11

Hasil uji laboratorium diatas menunjukkan ada satu parameter yang melebihi batas maksimum yakni parameter kimia mangan (Mn), mangan pada air berfungsi untuk menyeimbangkan rasa ataupun bau pada air, jika unsur mangan ini lebih tinggi dari batas maksimum maka air yang digunakan akan berasa lain dari air pada umumnya. Akan tetapi secara keseluruhan rata-rata uji laboratorium parameter uji sangat rendah atau dibawah batas maksimum dalam ketentuan untuk keperluan higiene dan sanitasi. Hasil analisis dan perhitungan skoring menunjukkan bahwa seluas 23,772.82 ha pada lokasi studi memiliki ketersediaan air yang sedang, artinya daerah tersebut memiliki ketersediaan air tanah dalam dan dangkal, dan air permukaan dengan klasifikasi sedang.

Tabel 10. Satuan Kemampuan Lahan Ketersediaan Air

No.	Distrik	Klasifikasi SKL Ketersediaan Air			
		Kurang	Rendah	Sedang	Cukup
1.	Windesi	3,432.35	-	55,020.97	-
2.	Nikiwar	-	-	23,772.82	-
3.	Wamesa	48,139.46	-	10,056.62	-
4.	Rumberpon	10,292.86	-	18.79	-
5.	Soug Wepu	49,535.79	-	70.24	-
6.	Roswar	10,563.67	-	8.19	-
Luas (Ha)		121,964.10	-	88,947.63	-

Didalam pengukuran satuan kemampuan lahan sesuai arahan Peraturan Menteri Penataan Ruang No. 20 Tahun 2007 tentang Pedoman Analisis Aspek Fisik dan Lingkungan, Ekonomi serta Sosial Budaya Dalam Penyusunan Rencana Tata Ruang, dijelaskan bahwa SKL terdiri dari SKL morfologi, kemudahan dikerjakan, kestabilan lereng, kestabilan pondasi, ketersediaan air, drainase, erosi, pembuangan limbah, dan rawan bencana.

Tabel 11. Kemampuan Lahan Ibukota DOB Kabupaten Kuri Wamesa

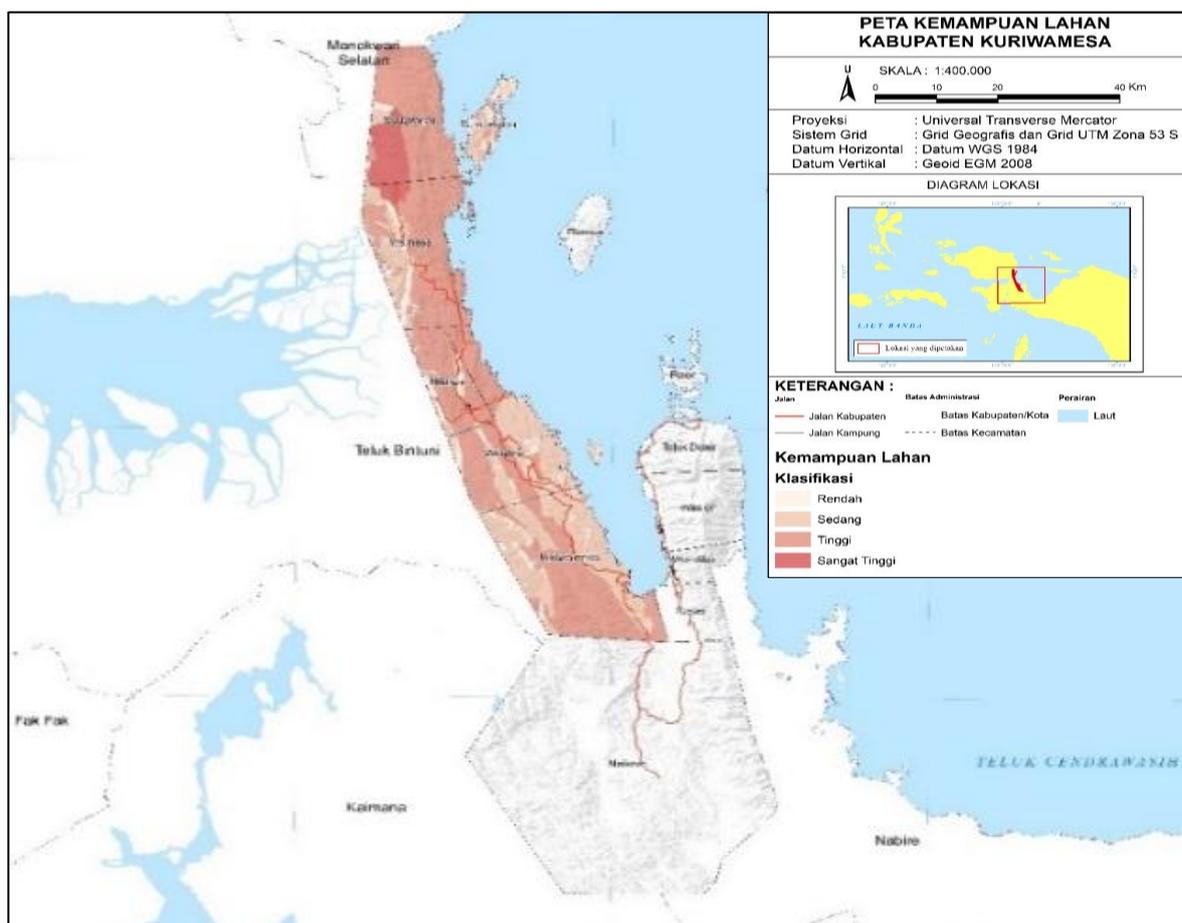
No	Penilaian	A	B	C	D	E	F	G	H	Kemampuan Lahan
1.		5	1	5	3	5	5	3	5	Total Nilai
2.		5	1	5	3	5	5	3	5	28
3.	Bobot x	10	2	10	6	10	10	6	10	57
4.	Nilai	15	3	15	9	15	15	9	15	96
5.		20	4	20	12	20	20	12	20	108
6.		25	5	25	15	25	25	15	25	160

Keterangan: A: SKL Morfologi; B: SKL Kemudahan Dikerjakan; C: SKL Kestabilan Lereng; D: SKL Kestabilan Pondasi; E: SKL Ketersediaan Air; F: SKL Drainase; G: SKL Terhadap Erosi; dan H: SKL Bencana Alam.

Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan lokasi studi, maka dapat diketahui rata-rata memiliki kemampuan lahan tinggi dengan luas 22,923.74 ha atau 1.68% dari luas total wilayah, luasan ini adalah luasan terendah kedua berdasarkan kemampuan lahan. Posisi Distrik Nikiwar berdasarkan kelas kemampuan lahan pengembangannya pada kelas D atau kemampuan pembangunan tinggi dan dapat dikembangkan secara maksimal.

Tabel 12. Klasifikasi Kemampuan Lahan Ibukota Calon DOB Kabupaten Kuri Wamesa

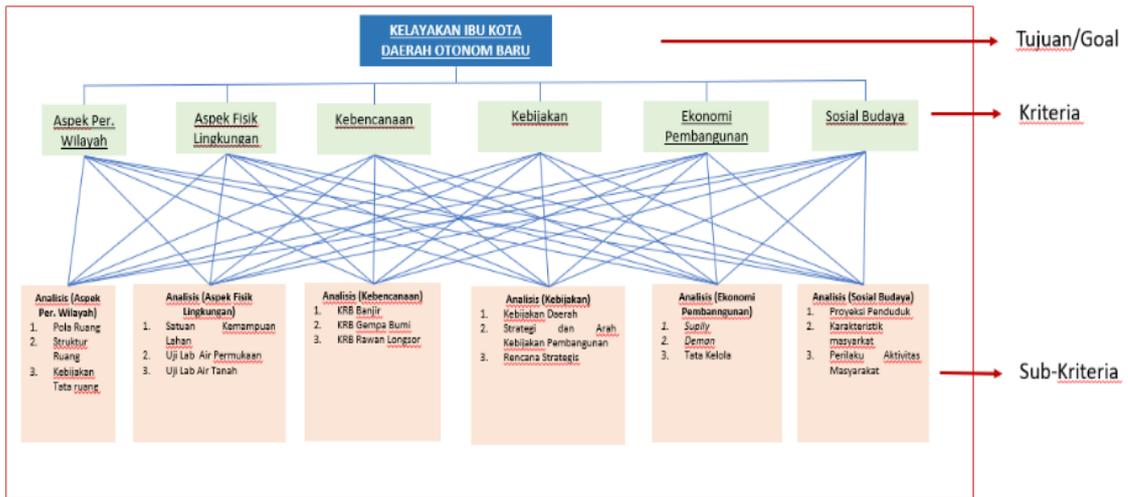
No.	Distrik	Total Nilai	Kelas Kemampuan Lahan	Klasifikasi Pengembangan	Luas (Ha)	Persentase (%)
1.	Roswar, Nikiwar, Rumberpon, Sougwepu, Wamesa, Windesi	55-80	Kelas B	Rendah	15,971.57	1.17
2.	Roswar, Nikiwar, Rumberpon, Sougwepu, Wamesa, Windesi	81-107	Kelas C	Sedang	462,801.25	33.94
3.	Roswar, Nikiwar, Rumberpon, Sougwepu, Wamesa, Windesi	108-134	Kelas D	Tinggi	861,702.84	63.20
4.	Sougwepu, Wamesa	135-160	Kelas E	Sangat Tinggi	22,923.74	1.68
Total					1,363,399.40	100.00



Gambar 2. Peta Kemampuan Lahan Kabupaten Kuri Wamesa.

Analisis Kelayakan Distrik Nikiwar Sebagai Ibukota Rencana Daerah Otonom Baru Kabupaten Kuri Wamesa

Perkembangan suatu kota dan wilayah, ditentukan atas empat aspek utama, yaitu aspek ekonomi, aspek sosial budaya, aspek fisik dan aspek lingkungan (Sumarauw, dkk., 2023). Selain itu penetapan Distrik Nikiwar sebagai ibukota rencana daerah otonom baru Kabupaten Kuri Wamesa mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007, yang mensyaratkan aspek administrasi, teknis, dan fisik kewilayahan (Wiridin, 2017). Aspek inilah yang dapat dijadikan dasar kriteria terhadap *Analysis Hierarchy Process* (AHP). Analisis ini digunakan untuk menghasilkan keputusan terhadap kelayakan ibukota calon daerah otonom baru Kabupaten Kuri Wamesa.



Gambar 3. Struktur Hirarki AHP Kelayakan Ibukota Calon DOB Kabupaten Kuri Wamesa

Skala kepentingan yang digunakan dalam metode AHP adalah sebagai berikut:

- 1 : Kedua elemen sama pentingnya (pengaruhnya sama besar).
- 3 : Elemen yang satu sedikit lebih penting daripada elemen yang lainnya.
- 5 : Elemen yang satu lebih penting daripada yang lainnya.
- 7 : Satu elemen jelas lebih mutlak penting daripada elemen lainnya.
- 9 : Satu elemen mutlak penting daripada elemen lainnya.
- 2,4,6,8 : Nilai-nilai antara dua nilai pertimbangan-pertimbangan yang berdekatan, nilai ini diberikan bila ada dua kompromi di antara 2 pilihan.

Adapun rumus untuk menghitung *Consistency Rasio* (CR) (Kurniawati & Munir, 2017):

$$CR = CI/IR$$

Keterangan:

- CR : *Consistency Rasio*
- CI : *Consistency Index*
- IR : *Index Random Consistency*

Sebelum penyelesaian *Consistency Rasio* (CR) maka akan dihitung *Consistency Index* (CI) dengan rumus:

$$CI : (\lambda \max - n) / (n - 1)$$

Keterangan:

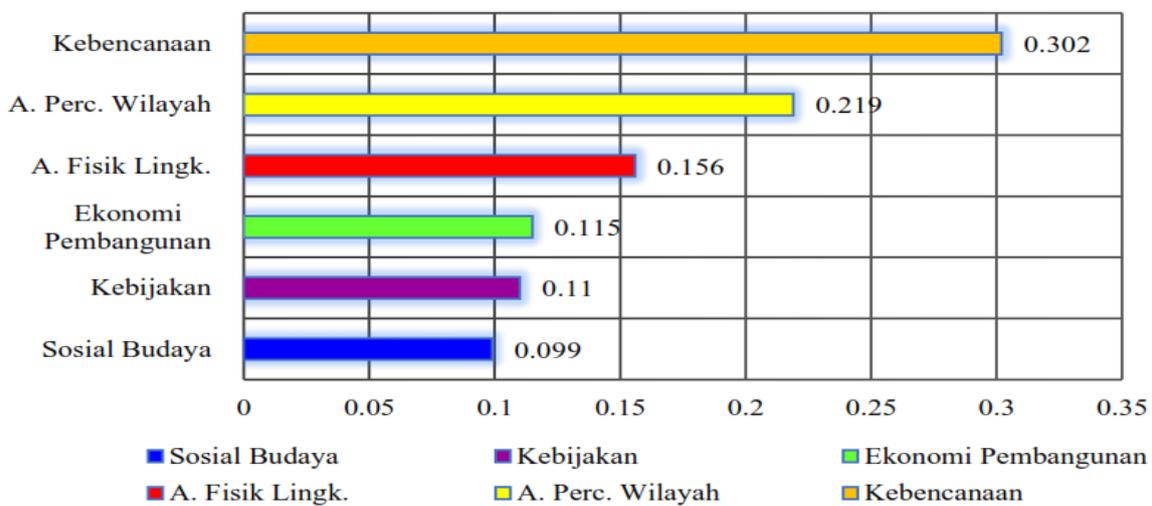
$$\lambda \max : \sum \lambda / n$$

n : banyaknya elemen

Tabel 13. Daftar Indeks Random Konsistensi

n	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
RI	0.00	0.00	0.58	0.90	1.12	1.24	1.32	1.41	1.45	1.49	1.51	1.48	1.56	1.57	1.59

Berdasarkan hasil analisis antar kriteria dari perbandingan 6 (enam) kriteria menghasilkan nilai *inconsistency* sebesar 0.07 atau dibawah dari ketentuan 0.1 yang mengartikan hasilnya konsisten. Adapun kriteria dari kelayakan ibukota beserta bobot penilaiannya tertera pada grafik dibawah ini.



Gambar 4. Diagram Rata-Rata Kriteria Kelayakan Ibukota Calon DOB Kabupaten Kuri Wamesa.

Dari hasil analisis antar sub kriteria menunjukkan nilai *inconsistency* dibawah dari ketentuan 0.1 atau dapat disimpulkan secara konsisten dan tidak terjadi *error* dalam perhitungan hirarki.

Tabel 14. Rekapitulasi Nilai Hasil Analisis Hirarki Proses (AHP)

No.	Kriteria	Skor/Nilai Kriteria)	Sub Kriteria	Skor/Nilai (Sub-Kriteria)
1.	Aspek Perencanaan Wilayah	0.219	Pola Ruang	0.471
			Struktur Ruang	0.375
			Kebijakan Tata Ruang	0.172
2.	Aspek Fisik Lingkungan	0.156	Satuan Kemampuan Lahan	0.464
			Uji Lab Air Tanah	0.339
			Uji Lab Air Permukaan	0.197
3.	Kebencanaan	0.302	KRB Banjir	0.471
			KRB Gempa Bumi	0.375
			KRB Longsor	0.172
4.	Kebijakan	0.110	Kebijakan Daerah	0.409
			Strategi dan Arah Kebijakan	0.366
			Pembangunan	

No.	Kriteria	Skor/Nilai Kriteria)	Sub Kriteria	Skor/Nilai (Sub-Kriteria)
5.	Ekonomi Pembangunan	0.115	Rencana Strategis	0.224
			Tata Kelola	0.488
			<i>Demand</i>	0.290
6.	Sosial Budaya	0.099	<i>Supplay</i>	0.233
			Perilaku Aktivitas Masyarakat	0.274
			Proyeksi Penduduk	0.359
			Karakteristik Masyarakat	0.267

Sumber: Hasil Analisis AHP, Tahun 2024

Maka, berdasarkan hasil analisis *Analitycal Hierarchy Process* (AHP) tersebut diatas disimpulkan bahwa Distrik Nikiwar layak menjadi ibukota calon Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Kuri Wamesa.

KESIMPULAN

Kesimpulan penelitian ini adalah lokasi studi memiliki tingkat kemampuan lahan yang tinggi. Berdasarkan klasifikasi kemampuan lahan, posisi Distrik Nikiwar termasuk dalam kelas kemampuan pembangunan tinggi dan memiliki potensi untuk dikembangkan secara maksimal. Selain itu, Distrik Nikiwar dinilai layak sebagai calon ibu kota kabupaten dengan nilai konsistensi perhitungan AHP di bawah 0.1. Penilaian tersebut didasarkan pada parameter aspek perencanaan wilayah, kondisi fisik lingkungan, potensi kebencanaan, kebijakan, pembangunan ekonomi, serta sosial budaya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ama, J, T., 2025. *Tinjauan Yuridis Pemekaran Wilayah Daerah Provinsi Berkaitan Dengan Wacana Pemekaran Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT)*. Media Hukum Indonesia (MHI). 2(5): 1-14.
- Dianutami, A., Pratiwi, N, N., dan Yuniarti, E., 2023. *Analisis Kesiapan Lokasi Kabupaten Sintang Sebagai Calon Ibu Kota Provinsi Kapuas Raya*. JeLAST: Jurnal Teknik Kelautan, PWK, Sipil, dan Tambang. 10(1): 1-10.
- Fachrurrizal, M, I., dan Hayati, R., 2014. *Pemilihan Lokasi Ibukota Kabupaten di Wilayah Proyeksi Pemekaran Kabupaten Bekasi Utara*. Geo Image (Spatial-Ecological-Regional). 3(2): 1-7.
- Kurniawati, A, T., dan Munir, M., 2017. *Analytic Hierarchy Process (AHP) untuk Penentuan Rangkaing Penggunaan Lahan*. Journal of Research and Technology. 3(1): 54-62.
- Milasari, L, A., Gobel, F, F., Erick, A, Y, P., Saputri, F, R., Umar, I., Gai, A, M., Saputra, A, A., Firdaus., dan Dulame, I, M., 2023. *Perencanaan Wilayah*. Get Press Indonesia, Padang.
- Pratama, I. T., Rozikin, M., dan Zauhar, S., 2018. *Penentuan Alternatif Lokasi Ibukota Kabupaten Mojokerto Berdasarkan Stakeholder*. Jurnal Tata Kota dan Daerah. 10(1): 48-49.
- Rantini, R., Lisanti, M., Sucipta, Y, M., Bashir, I, A., dan Prayudha, M, R., 2023. *Kelayakan Kawasan Perkotaan Tanjung Palas Sebagai Ibu Kota Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara*. Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara. 10(02): 295-312.
- Tangke, R., Tampi, G, B., dan Ruru, J, M., 2021. *Evaluasi Kelayakan Pemekaran Kabupaten Luwu Tengah Menjadi Daerah Otonom Baru di Kabupaten Luwu Provinsi Sulawesi Selatan*. Jurnal Administrasi Publik. 109(VII): 18-25.
- Sumarauw, M, L., Sutrisno, A, J., dan Setiawan, A, W., 2023. *Penggunaan Analytical Hierarchy Process Dalam Penentuan Konsep Desain Lanskap Wisata di Desa Tijayan*. Mediagro. 19(20): 140-151.

- Wahyuningsih, D., Qodir, Z., dan Syarifuddin, T. I., 2020. *Dinamika Pemekaran Wilayah Nagari Rabi Jonggor Kabupaten Pasaman Barat*. Journal of Government Science (GovSci). 1(2): 64-83.
- Wiridin, D., 2017. *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Dalam Penetapan Labungkari Sebagai Ibukota Kabupaten Buton Tengah*. Jurnal Hukum Volgeist. 2(1): 1-12.